

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan PPDB berbasis zonasi dan menilai apakah kebijakan tersebut sudah menciptakan pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Implementasi kebijakan PPDB dilihat dari dimensi kesulitan masalah, kemampuan menstrukturkan proses dan faktor eksternal yang merupakan pemikiran Daniel Mazmanian dan Sabatier. Sedangkan *equality of opportunity* dilihat dari dimensi keadilan dasar, keadilan prosedural dan keadilan pemikat dari pemikiran Jacob A. Lesley.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, observasi, studi dokumen dan penelusuran secara online. Informan penelitian ditentukan secara *purposive* dan kemudian dilakukan dengan *snowball* dengan total 20 informan yang terdiri dari Dinas Pendidikan, dan beberapa Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya kebijakan zonasi, pemerintah kabupaten Mojokerto sudah terlebih dahulu menggunakan sistem yang mirip dengan zonasi, hal ini kemudian membuat perubahan pola perilaku yang dijadikan tujuan dalam kebijakan zonasi belum terlaksana secara efektif karena masyarakat masih berfokus pada sekolah-sekolah tertentu saja, sedangkan dalam aspek ekualitas akses kebijakan zonasi belum menciptakan kondisi yang ekuwal dikarenakan kebijakan zonasi belum diikuti dengan upaya pemerataan fasilitas ataupun infrastruktur antar sekolah yang ada.

Kata Kunci: pemerataan akses, kebijakan publik, pendidikan, keadilan